

## BAB 2

### LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1 *Agency Theory*

Perusahaan yang sudah menawarkan kepemilikan sahamnya kepada publik (*go public*) menunjukkan terjadinya pemisahan kepemilikan antara investor sebagai pemilik modal dan manajemen sebagai pelaksana kegiatan dalam perusahaan (Indriani: 2013). Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Godfrey, Hodgson, Tarca, Hamilton dan Holmes (2010) bahwa teori keagenan adalah hubungan antara dua pihak yaitu *principal (stakeholder)* dan agen (perusahaan) untuk melaksanakan beberapa kegiatan untuk kepentingan pihak *principal*. Pemegang saham selaku *principal* memberikan wewenang terhadap kepada manajer selaku agen. Agen harus bertanggungjawab dengan memberikan informasi mengenai kegiatan perusahaan kepada pemegang saham.

Masalah keagenan tersebut dapat menimbulkan biaya agensi (*agency cost*). Menurut Jensen, et.al (1976) dalam Godfrey, et.al (2010) terdapat tiga biaya agensi yaitu :

1. *Monitoring Cost* (Biaya Pemantauan)

Adalah biaya pemantauan perilaku agen dimana *principal* mengeluarkan biaya untuk mengukur, mengamati dan mengendalikan perilaku agen. Biaya pemantauan antara lain biaya audit, biaya penetapan kompensasi manajemen, pembatasan anggaran dan aturan operasi.

2. *Bonding Cost* (Biaya Ikatan)

Adalah biaya pembuatan dan penyesuaian mekanisme yang dilakukan oleh agen untuk menjamin mereka. Biaya ikatan ini ditanggung oleh agen. Contohnya seperti manajer (agen) secara sukarela dapat memberikan laporan keuangan triwulanan kepada pemegang saham (*principal*) yang menunjukkan bahwa manajer memiliki keunggulan komparatif dalam mempersiapkannya, atau manajer mungkin melakukan kontrak untuk tidak mengungkapkan informasi tertentu kepada pesaing.

### 3. *Residual Loss* (Sisa Kerugian)

Adalah dampak atas tindakan yang dilakukan agen yang kadang berbeda dari tanggungjawabnya yakni untuk memaksimalkan kepentingan atau kekayaan *principal*.

## 2.2 Asimetri Informasi

Rahmawati (2008) dalam Indriani (2013) teori keagenan berimplikasi kepada timbulnya ketidakseimbangan penyampaian informasi atau asimetri informasi antara agen dan *principal*. Manajer akan mengetahui informasi lebih mengenai kegiatan usaha perusahaan dibandingkan pemegang saham. Dengan demikian, penyampaian informasi oleh pihak manajemen perusahaan seringkali tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya atau dapat pula manajemen menyembunyikannya dari investor. Hal demikian disebut asimetri informasi.

Scott (2000) dalam Amaliah (2010) ada dua macam asimetri informasi yaitu :

#### 1. *Adverse Selection*

Agen (manajer) memiliki sesuatu yang lebih banyak dibandingkan pihak-pihak diluar perusahaan termasuk *principal* (pemegang saham) mengenai keadaan dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang. Hal demikian dapat berdampak kepada agen akan menyembunyikan fakta mengenai kondisi perusahaan yang sebenarnya kepada *principal*.

#### 2. *Moral Hazard*

Kegiatan yang dilakukan oleh agen dimana tidak diketahui seluruhnya oleh *principal* yangmana dapat mengakibatkan agen akan melakukan tindakan diluar pengetahuan *principal* dan secara etika dan norma tindakan tersebut tidak layak.

Rahmawati (2006) dalam Indriani (2013) penyampaian informasi melalui laporan keuangan dan laporan tahunan kepada pemegang saham akan meminimalkan asimetri informasi yang terjadi. Laporan keuangan serta laporan tahunan sebagai sarana penyampaian informasi akuntansi yang dilakukan dari manajemen kepada pemegang saham. Informasi akuntansi yang dimaksud ialah informasi yang berkualitas meliputi pengungkapan informasi baik bersifat wajib maupun sukarela.

## **2.3 Laporan Keuangan**

### **2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Berikut adalah beberapa definisi dari Laporan Keuangan. Menurut PSAK 1 pengertian dari Laporan Keuangan ialah :

*“Suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”.*

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007: 7) :

*“Laporan Keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berakitan dengan laporan tersebut misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga”.*

Dari kedua definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan adalah penyajian yang meliputi kondisi keuangan perusahaan dari hasil kegiatan operasional dimana akan bermanfaat bagi pihak internal maupun eksternal.

### **2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Pada dasarnya, perusahaan membuat sebuah Laporan Keuangan dengan tujuan untuk menarik pihak eksternal terutama para investor untuk tertarik menanamkan modalnya di perusahaan tersebut dengan melihat informasi keuangan dan non keuangan yang terdapat dalam laporan secara rinci dan jelas. Dan pada akhirnya berfungsi untuk pengambilan keputusan. Seiring dengan berkembangnya jaman, tidak hanya para pengambilan keputusan saja yang berhak membaca dan melihat Laporan Keuangan. Thahir (2008) Melalui laporan keuangan akan dapat dinilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban baik jangka panjang maupun pendek, struktur modal perusahaan, pendistribusian pada aktiva, efektivitas dari penggunaan aktiva, pendapatan atau hasil usaha yang telah dicapai, beban tetap yang harus dibayar oleh perusahaan serta nilai buku dari setiap lembar saham perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia (2007: 3) mengemukakan beberapa tujuan dari laporan keuangan yakni :

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan ekonom, karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari berbagai kejadian di masa yang lalu (historis), dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan
3. Laporan keuangan juga telah menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen (*stewardship*) atau merupakan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin melakukan penilaian terhadap apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen, melakukan hal ini agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin saja mencakup keputusan untuk menanamkan atau menjual investasi mereka dalam suatu perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau melakukan penggantian manajemen.

### **2.3.3 Manfaat Laporan Keuangan**

Menurut Suharli (2009: 4) bahwa manfaat laporan keuangan bagi dunia bisnis yaitu :

1. Menyediakan informasi ekonomis suatu perusahaan yang relevan untuk pengambilan keputusan investasi dan kredit yang tepat.
2. Menjadikan media komunikasi bisnis antara manajemen dan pengguna eskternal mengenai posisi keuangan, perubahan posisi keuangan dan arus kas perusahaan.
3. Memberikan potret yang dapat diandlkan menegnai kemampuan menghasilkan laba dan arus kas perusahaan.
4. Menjadikan bentuk pertanggungjawaban manajemen (*stewardship*) kepada para pemilik perusahaan.
5. Menjadikan gambaran kondisi perusahaan dari suatu period ke periode berikutnya mengenai pertumbuhan atau kemunduran dan memungkinkan untuk diperbandingkan dengan perusahaan lain pada industri sejenis.

Bersangkutan dengan pengguna laporan keuangan yakni pengguna internal dan eskternal. Pengguna internal yang mana berakibat langsung kepada operasional perusahaan yaitu dewan komisaris, dewan direksi, manajer dan karyawan. Sedangkan pengguna eskternal yang mana menghasilkan keputusan terkait dengan hubungan mereka terhadap perusahaan yaitu investor, kreditor, pemerintah, pemasok, pelanggan dan komunitas terkait (Suharli, 2009: 4).

Berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia (2007: 2) kebutuhan informasi dalam laporan keuangan diperlukan untuk para pengguna diantaranya :

1. Investor

Membantu menentukan pengambilan keputusan atas modal yang ditanamkan kepada perusahaan tersebut demi mendapatkan keuntungan. Pemegang saham sangat tertarik kepada informasi yang menguntungkan seperti pembayaran dividen dengan menilai kemampuan perusahaan.

2. Karyawan

Informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan sangat menarik mereka. Selain itu, pemberian balas jasa, imbalan pascakerja dan kesempatan kerja merupakan beberapa informasi yang sangat dibutuhkan.

3. Pemberi Pinjaman

Mereka sangat tertarik mengenai informasi keuangan untuk melihat kemampuan perusahaan dapat membayarkan kewajibannya pada saat jatuh tempo atau sebaliknya.

4. Pemasok dan Kreditor Usaha Lainnya

Informasi untuk memutuskan jumlah yang terutang yang akan dibayar pada jatuh tempo sangat menarik bagi mereka. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali pelanggan utama yang bergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.

5. Pelanggan

Informasi kelangsungan hidup perusahaan sangat menjadi perhatian utama publik terutama pelanggan perusahaan tersebut. Apabila, pelanggan terlibat dalam perjanjian jangka panjang akan sangat bergantung kepada perusahaan.

6. Pemerintah

Berbagai lembaga termasuk pemerintah berkepentingan dengan alokasi sumber daya maka sangat memerlukan informasi aktivitas perusahaan. Selain

itu,kebutuhan mengatur aktivitas, menetapkan kebijakan atas pajak dan dapat menjadi dasar penyusunan stastistik pendapatan nasional.

#### 7. Masyarakat

Laporan keuangan membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (tren) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara seperti kontribusi pada perekonomian nasional untuk lapangan pekerjaan.

### 2.3.4 Karakteristik Laporan Keuangan

Karakteristik yang dimaksud adalah karakteristik kualitatif. Menurut PSAK 1 No. 24 Tahun 2007 terdapat empat karakteristik kualitatif yang membuat laporan keuangan berguna bagi pengguna antara lain :

#### 1. Dapat dipahami

Pengguna laporan keuangan diasumsikan sudah memiliki pengetahuan memadai mengenai perekonomian, bisnis dan akuntansi agar dapat memahami informasi yang disampaikan.Penyampaian informasi agar mudah untuk dipahami meliputi penggunaan bahasa yang tepat.Tetapi terdapat pula informasi kompleks yang tidak dapat disajikan dalam laporan dikarenakan informasi tersebut sulit dipahami untuk pengguna tertentu.

#### 2. Relevan

Informasi yang relevan sangat berguna bagi para pengambil keputusan. Peran informasi dalam peramalan dan penegasan berkaitan satu sama lain. Artinya, posisi keuangan dan kinerja perusahaan di masa lalu dapat berguna sebagai dasar untuk memprediksi pada masa depan. Informasi yang demikian dapat menambah nilai yakni prediktif pada laporan keuangan. Tidak hanya demikian, menampilkan transaksi di masa lalu juga penting.

#### 3. Materialitas

Suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kuliitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna (PSAK 1, 2007:6). Dari pengertian materialitas tersebut dapat dikatakan bahwa informasi harus dilihat material.Yang disebut material yakni kesalahan dalam laporan keuangan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna.Kesalahan dapat salah mencantumkan dan salah mencatat.

#### 4. Dapat Dibandingkan

Laporan keuangan dibandingkan terhadap periode-periode sebelumnya dengan tujuan melihat tren posisi dan kinerja keuangan. Tidak hanya antar periode, tetapi antar perusahaanpun juga harus dapat dilakukan oleh pengguna. Dengan membandingkan, pengguna mendapatkan informasi kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Mematuhi standar akuntansi keuangan saja termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi (PSAK 1, 2007:8).

#### 2.4 Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

Penyajian informasi berupa data keuangan dalam Laporan Keuangan tidaklah cukup, para pengguna membutuhkan lebih dari informasi tersebut. Maka, perusahaan menyajikan informasi pendukung melalui laporan tahunan (*annual report*). Laporan tahunan adalah suatu dokumen yang diterbitkan tiap tahun oleh suatu emiten yang berisi laporan keuangan yang telah diperiksa akuntan publik dan didalamnya terdapat laporan keuangan perusahaan termasuk informasi tambahan mengenai perusahaan dan produknya serta hal-hal yang berkaitan dengan usaha perusahaan selama satu tahun (Annisa: 2010 dalam Indriani: 2013). Pengungkapan informasi harus transparan dan jelas mengenai kondisi perusahaan dalam laporan tahunan.

Pengungkapan ini dilakukan untuk melindungi hak pemegang saham yang cenderung terabaikan akibat terpisahnya pihak manajemen yang mengelola perusahaan dan pemegang saham yang memiliki modal. Informasi yang diungkapkan tentunya harus disesuaikan dengan kepentingan pengguna Laporan Keuangan (Anwar: 2010).

Terdapat pihak yang membutuhkan informasi keuangan maupun non keuangan. Pihak-pihak tersebut diklasifikasikan berdasarkan kepentingan sebagai berikut Elliot (1994) dalam Maulida (2009):

1. *The Entity*  
*Interest*  
Pihak internal perusahaan termasuk pemilik dan karyawan termasuk manajemen perusahaan.
2. *Non-owners*  
*interest*

Pihak investor, kreditor dan juga pihak lainnya yang tidak termasuk dalam kategori the *entity interest*, yang bermaksud adalah investor-investor yang berinvestasi di pasar modal.

3. *National Interest*

Kepentingan negara yang menjadi kepentingan perusahaan.

#### 2.4.1 Kriteria Pengungkapan

Hendriksen (1992) dalam Anwar (2010), terdapat tiga konsep pengungkapan yaitu:

1. Pengungkapan Cukup (*Adequate Disclosure*)

Pengungkapan yang bertujuan untuk memenuhi kewajiban dalam menyampaikan informasi (Anwar: 2010). Informasi yang disampaikan merupakan yang diwajibkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, investor mendapatkan pemahaman memadai.

2. Pengungkapan Wajar (*Fair Disclosure*)

Pengungkapan yang etis dimana disajikan untuk memuaskan para pengguna dianggap potensial oleh perusahaan dengan mengungkapkan informasi yang layak.

3. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang relevan. Dengan penyajian yang lengkap dapat mengakibatkan beberapa pihak menganggap tidak baik disebabkan akan menyebabkan informasi yang tidak jelas sehingga menjadikan laporan keuangan tidak dapat dipahami oleh pengguna (Indriani: 2013).

Informasi yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan terdiri dari dua jenis yaitu Pengungkapan Wajib (*Mandatory Disclosure*) dan Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*). Berikut pengertian masing-masing pengungkapan:

1. Pengungkapan Wajib (*Mandatory Disclosure*)

Menurut Nuswandari (2009) pengungkapan wajib adalah informasi yang harus diungkapkan oleh emiten yang diatur oleh peraturan pasar modal suatu negara. Penyampaian laporan tahunan merupakan salah satu kewajiban pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan Peraturan BAPEPAM X.K.6 perihal Penyampaian Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik bahwa laporan tahunan wajib memuat:



- a. Ikhtisar data keuangan penting,
- b. Laporan dewan komisaris,
- c. Laporan direksi,
- d. Profil perusahaan,
- e. Analisis dan pembahasan manajemen,
- f. Tata kelola perusahaan,
- g. Tanggung jawab sosial perusahaan,
- h. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan
- i. Surat pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi laporan tahunan.

Khusus pada laporan analisa dan pembahasan manajemen wajib memuat tinjauan operasi per segmen, analisis kinerja keuangan komprehensif, analisa manajemen terhadap kondisi bisnis, perubahan yang signifikan, dampak terhadap entitas, penghargaan dan penjelasan kebijakan akuntansi yang diterapkan.

Pengungkapan yang wajib lainnya terdapat pada peraturan BAPEPAM X.K.6 adalah mengenai saham yakni jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, terendah dan volume perdagangan. Berikut ini ikhtisar data keuangan yang wajib diungkapkan dalam laporan tahunan :

Tabel 2.1 : Ikhtisar Data Keuangan dalam Laporan Tahunan

No	Ikhtisar Data Keuangan Penting
1	Pendapatan
2	Laba Bruto
3	Laba (rugi)
4	Jumlah laba (rugi) yang distribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali
5	Total laba (rugi) komprehensif
6	Jumlah laba (rugi) komprehensif distribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali
7	Laba (rugi) per saham
8	Jumlah aset
9	Jumlah liabilitas

10	Jumlah ekuitas
11	Rasio liabilitas terhadap jumlah aset
12	Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset
13	Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas
14	Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan
15	Rasio Lancar
<b>No</b>	<b>Ikhtisar Data Keuangan Penting</b>

Sumber :	16	Rasio liabilitas terhadap ekuitas
BAPEPA	17	Rasio liabilitas terhadap jumlah aset
M X.K.6	18	Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan perusahaan dan jenis industrinya

## D

alam PSAK 31 (Revisi 2009) bahwa instrumen keuangan wajib diungkapkan dalam neraca, laporan laba rugi dan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan. Di neraca, instrumen keuangan yang termasuk adalah aset keuangan atau kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar, reklasifikasi aset serta penghentian pengungkapan. Sedangkan di laporan laba rugi dan entitas yang wajib untuk diungkap adalah item-item penghasilan, beban, laba dan rugi entitas. Penghentian pengungkapan mewajibkan entitas untuk mengungkap setiap kelompok aset keuangan termasuk sifat aset, sifat risiko dan manfaat atas kepemilikan, ketika entitas mengakui seluruh aset jumlah nilai tercatat dan ketika entitas mengakui melanjutkan pengakuan aset.

PSAK 50 (Revisi 2006) menyatakan bahwa format dan kelompok instrumen keuangan dalam laporan tahunan juga harus diatur. Pengungkapan meliputi penjelasan bentuk narasi dan data kuantitatif serta *judgement* untuk menyeimbangkan pengungkapan informasi yang tidak bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan yang dapat mengaburkan informasi penting. Pengklasifikasian instrumen berdasarkan sifat dan informasi yakni membedakan *item* pada biaya perolehan atau biaya perolehan yang diamortisasi dari *item* yang diukur pada nilai wajar.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut disimpulkan bahwa didalam laporan tahunan, perusahaan wajib mengungkapkan informasi mengenai data keuangan di neraca, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan, laporan dewan komisaris, laporan direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen tentang keuangan dan manajemen terhadap kondisi bisnis, tata kelola

perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan surat pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi laporan tahunan. Pengungkapan informasi – informasi tersebut disajikan dalam bentuk narasi serta instrumen keuangan untuk dapat diklasifikasikan menurut sifat agar dapat bermanfaat untuk para pengguna laporan tahunan.

## 2. Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*)

Kurniawan (2014) pengungkapan sukarela memberikan informasi tambahan diluar dari informasi yang wajib diungkap dalam laporan tahunan yang akan memberikan pandangan kepada para pengambil keputusan terhadap entitas. Manajemen bebas memiliki hak mengenai informasi yang akan diungkapkan melalui pertimbangan- pertimbangan seperti manfaat yang akan didapat untuk perusahaan.

### 2.4.2 Pengungkapan Sukarela

Nuryaman (2009) dalam Kurniawan (2014) pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan diluar yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku. Suta (2012) dalam Kurniawan (2014) penyajian laporan keuangan dengan memberikan informasi yang lengkap dan jelas, dan menggambarkan kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi.

Pengungkapan Sukarela memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk pengambilan keputusan oleh para pemakai laporan tahunan. Pengungkapan sukarela dapat berupa laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*) (Kurniawan,2014:17). Dalam PSAK No. 1 paragraf 12 (IAI,2009) dalam Indriani (2013) menjelaskan pengungkapan sukarela:

*“Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement),khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna informasi yang menganga peranan penting.Laporan tambahan tersebut diluar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan”.*

Suryasih dan Nuraini (2011) Pengungkapan sukarela tidak memiliki panduan untuk memilih item-item untuk menjadi alat ukur luasnya pengungkapan. Kebijakan manajemen dalam mengungkap informasi sukarela dipengaruhi oleh biaya dan

manfaat yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Informasi pengungkapan sukarela diklasifikasikan dalam dua bentuk yakni informasi keuangan langsung (pengungkapan kuantitatif) dan pengungkapan kualitatif. Kedua bentuk tersebut membantu investor dalam memahami perusahaan lebih baik.

Sutomo (2004) dalam Indriani (2013) pertimbangan manajemen dalam kebijakannya untuk mengungkapkan informasi secara sukarela umumnya dipengaruhi oleh faktor biaya dan manfaat. Manajemen akan mengungkapkan informasi secara sukarela bila manfaat yang diperoleh pengungkapan informasi tersebut lebih besar dari biayanya. Choi dan Meek (2010:176) dalam Wijayanti (2013) terdapat beberapa manfaat yang didapat manajemen mengungkapkan informasi secara sukarela karena :

1. *Voluntary disclosure* berdampak pada likuiditas saham perusahaan
2. *Voluntary disclosure* dapat mengurangi *cost of capital* (biaya modal)
3. *Voluntary disclosure* berdampak pada biaya transaksi yang lebih rendah dalam perdagangan sekuritas perusahaan

Dengan adanya *voluntary disclosure*, maka nilai perusahaan dimata investor akan meningkat yang tercermin dari harga saham perusahaan tersebut (Indriani, 2013: 18). Hendriksen dan Breda (2001: 860) dalam Putri (2010) menyampaikan bahwa manajemen juga dapat tidak mengungkapkan informasi secara sukarela dikarenakan beberapa alasan:

1. Pengungkapan sukarela akan membantu para pesaing dan merugikan para pemegang saham
2. Pengungkapan yang lengkap akan menguntungkan serikat kerja dalam tawar menawar upah
3. Adanya anggapan bahwa investor tidak dapat memahami kebijakan dan prosedur yang diambil oleh perusahaan sehingga pengungkapan penuh hanya akan menyesatkan mereka
4. Adanya informasi selain laporan keuangan yang dapat diakses dari sumber-sumber dan biaya yang lebih murah
5. Kurangnya pengetahuan tentang kebutuhan investor

Penelitian ini menggunakan indeks pengungkapan sukarela dalam menguji hipotesis. Indeks pengungkapan sukarela adalah rasio jumlah item informasi yang dipenuhi oleh manajemen dalam laporan tahunan dengan jumlah item informasi yang mungkin dapat dipenuhi. Semakin banyaknya item informasi yang disampaikan

secara sukarela dalam laporan tahunan maka semakin luas dan besar indeks pengungkapan sukarela.

Indeks pengungkapan yang digunakan adalah Indeks Botosan. Walker dan Tsalta (2001) dalam Utama (2012) Indeks Botosan terpilih dari item berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh *American Institute Certified Public Accountants* pada tahun 1994, survei terhadap kebutuhan informasi investor oleh *SRI International* tahun 1987 dan studi laporan tahunan oleh *Canadian Institute of Chartered Accountants* tahun 1991. Botosan (1997) dalam Utama (2012) Indeks Botosan dihitung dengan menjumlahkan skor pengungkapan pada lima kategori informasi sukarela yang disampaikan dalam laporan tahunan yaitu latar belakang informasi, ringkasan hasil *historical*, statistik non- keuangan, analisa dan pembahasan manajemen dengan informasi yang diproyeksikan. Kelima kategori tersebut dipandang sebagai nilai (*value added*) dalam pengambilan keputusan oleh para investor dan analis keuangan.

Di dalam peraturan BAPEPAM X.K.6 bahwa analisa dan pembahasan manajemen termasuk kedalam item informasi yang wajib diungkap oleh emiten dalam laporan tahunan, tetapi menurut Botosan (1997) adalah sebagai item informasi yang diungkapkan secara sukarela.

### **2.4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela**

Manajemen selain harus mempertimbangan manfaat dan juga biaya sebelum mengungkapkan informasi yang tidak diwajibkan oleh peraturan yang berlaku, terdapat juga pertimbangan dari segi internal yakni karakteristik perusahaan dimana akan diteliti dalam penelitian ini.

#### **2.4.3.1 Ukuran Perusahaan**

Nuryaman (2009) dalam Kurniawan (2014) ada tiga alternatif untuk menentukan besarnya ukuran perusahaan yaitu ukuran aktiva, hasil penjualan bersih dan kapitalisasi pasar (*market capitalized*). Wijayanti (2013) penjelasan mengenai ketiga cara tersebut adalah:

##### **1. Ukuran Aktiva atau Ukuran Total Aset**

Asset terbagi menjadi dua yaitu aset lancar dan aset tetap. Kepemilikan aset tetap yang besar menunjukkan kegiatan operasi perusahaan akan dapat ditopang dengan baik tercermin melalui *revenue* yang akan diperoleh.

## 2. Hasil Penjualan Bersih

Pertumbuhan permintaan produk merupakan hal penting untuk kesuksesan investasi perusahaan. Tujuan yang akan dicapai bukan dilihat dari berapa penjualan per unit melainkan kemampuan menghasilkan laba.

## 3. Kapitalisasi Pasar(*Market Capitalized*)

Besarnya kapitalisasi pasar dapat dilihat dari semakin banyaknya penjualan maka semakin banyak pula perputaran uang. Demikian, perusahaan akan semakin dikenal oleh masyarakat terutama dimata investor.

Wijayanti (2013) menyatakan semakin besar perusahaan, maka perusahaan akan menghadapi biaya politik yang tinggi, perusahaan besar akan menghadapi tuntutan lebih daripada *stakeholder* untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan. Perusahaan yang sudah memiliki *brand image* di masyarakat biasanya yang berukuran sudah besar akan lebih banyak mengungkapkan informasi secara sukarela lebih tinggi dibanding yang berukuran kecil.

Kurniawan (2014) perusahaan besar menanamkan modalnya ke berbagai jenis usaha sehingga lebih mudah memasuki pasar modal dan memperoleh penilaian kredit yang tinggi, maka diperlukan pengungkapan informasi yang banyak. Selain hal tersebut, kepemilikan akan biaya produksi lebih rendah, mempunyai beragam produk dan beroperasi diberbagai wilayah juga membuat perusahaan besar insentif untuk memberikan pengungkapan sukarela. Dengan *resources* yang besar mulai total aktiva hingga sumber daya manusia dengan merekrut karyawan untuk menerapkan sistem informasi dan sistem pelaporan yang canggih menunjukkan perusahaan memiliki prospek yang baik untuk jangka waktu yang lama.

Semakin besar perusahaan, semakin tinggi mengungkapkan informasi sukarela (Rouf: 2011). Jensen dan Meckling (1976) dalam Albitar (2014) mengemukakan bahwa “*Agency costs are likely to increase with the proportion of outside capital. That proportion of outside capital tend to be higher for large companies, it is reasonable to speculate that large companies are more likely to provide more information in an attempt to reduce their agency costs*”.

### 2.4.3.2 *Leverage*

Kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, maka semakin besar *agency cost* (Wijayanti :2013). Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* tinggi cenderung mengungkapkan informasi keuangan yang lebih luas (Indriani: 2013). Perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi akan mengungkapkan kondisi kewajiban mereka secara terbuka kepada publik melalui laporan tahunan yang mengharapkan investor dapat memahami kondisi mereka.

Berbeda dengan (Wijayanti, 2013) dengan rasio *leverage* besar akan memunculkan keraguan untuk *going concern* perusahaan dimasa yang akan datang. Dana yang diperoleh akan digunakan untuk membayar hutang daripada operasional perusahaan. *Debt ratio* yang rendah lebih disukai oleh kreditor karena apabila dilikuidasi, kerugian akan di minimalisir untuk kreditor. Thahir (2008) mengemukakan bahwa terdapat empat jenis rasio *leverage* diantaranya :

#### 1. Rasio Hutang (*Debt Ratio*)

Rasio ini merupakan pengukuran yang menyeluruh karena terdapat proporsi kewajiban jangka pendek dan panjang terhadap aset. Tujuannya untuk mengukur besarnya aset yang dibiayai oleh kreditor dengan membandingkan total kewajiban dengan total aset. Semakin tinggi rasio hutang, maka semakin besar perusahaan didanai oleh kreditor (Wijayanti: 2013). Berbeda dengan Thahir (2008) dimana kreditor menginginkan rasio hutang yang rendah, karena jika tinggi mengartikan semakin besar resiko yang akan didapat. Hal tersebut berdampak pada perusahaan yang akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan modal pinjaman baru.

$$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aktiva}}$$

#### 2. *Financial Leverage*

Rasio ini dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap rentabilitas modal sendiri. Perhitungan menggunakan *total tangible net worth* dikurangi dengan *intangible asset*.

$$\text{Financial Leverage} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Modal Sendiri}}$$

### 3. *Times Interest Earned Ratio*

Nama lain dari rasio ini adalah *coverage ratio*. Rasio yang digunakan untuk mengukur labar perusahaan terutama sebelum dipotong pajak. Apabila mengalami penurunan, maka perusahaan akan sulit untuk membayar kewajibannya.

$$\text{Times Interest Earned Ratio} = \frac{\text{Laba sebelum bunga dan pajak}}{\text{Biaya Bunga}}$$

### 4. *Fixed Charge Coverage*

Rasio dapat melihat berapa laba usaha perusahaan sebelum dikurangi bunga pinjaman dan pembayaran sewa dimana digunakan untuk pembayaran beban tetap.

$$\text{Fixed Charge Coverage} = \frac{\text{EBIT} + \text{Pembayaran Sewa}}{\text{Biaya Bunga} + \text{Pembayaran sewa}}$$

Rasio *leverage* dapat menunjukkan banyaknya sumber dana yakni hutang yang digunakan untuk pembiayaan untuk perusahaan selain dari modal. Terdiri dari *debt to equity ratio*, *debt to total assets ratio* serta *equity multiplier* (Anwar: 2010). Menurut (Thahir: 2008) keempat jenis rasio diatas adalah termasuk rasio *leverage*, tetapi (Anwar: 2010) menyatakan hal sebaliknya. Keempat jenis rasio tersebut termasuk jenis rasio pemenuhan atau *coverage ratio*. *Coverage ratio* ialah rasio yang melihat kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya atas bunga pinjaman. Kemampuan tersebut terlihat dari tingginya *Times Interest Earned Ratio* dan *Fixed Charge Coverage* (Anwar: 2010).

#### 2.4.3.3 Profitabilitas

Perusahaan yang menghasilkan laba yang besar, akan menunjukkannya kepada publik agar menarik minat investor untuk berinvestasi melalui pengungkapan dalam laporan tahunan. Semakin tingginya profitabilitas perusahaan akan memicu manajemen mengungkapkan informasi secara luas karena akan meyakinkan investor (Indriani: 2013). Rasio profitabilitas adalah indikator manajemen untuk mengukur keefektifan perusahaan berdasarkan hasil pengembalian dari penjualan investasi (Thahir: 2008). Wijayanti (2013) terdapat beberapa rasio profitabilitas :

##### 1. *Net Profit Margin*

Rasio sering disebut dengan nama lain *return on sales* digunakan mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari tingkat penjualan.



Semakin tinggi *Net Profit Margin*, maka perusahaan akan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Thahir (2008) jika profit margin lebih rendah apabila dibandingkan dengan perusahaan sejenis dikarenakan harga jual lebih rendah atau harga pokok penjualan terlalu tinggi dibanding dengan pesaing.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Penjualan}}$$

#### 2. *Return on Asset (ROA)*

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan terhadap total aset untuk menghasilkan laba. Semakin besar *Return On Asset*, maka semakin tinggi tingkat pengembalian investasi serta semakin baik kinerja perusahaan.

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

#### 3. *Return On Equity (ROE)*

ROE adalah rasio yang dilihat dari sisi pemegang saham. Rasio yang mengukur seberapa besar laba bersih setelah dipotong pajak terhadap modal sendiri yang digunakan untuk mengukur kemampuan laba bagi pemegang saham.

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}}$$

#### 4. *Gross Profit Margin*

Rasio untuk mengukur seberapa besar laba kotor yang dihasilkan dari hasil penjualan perusahaan.

#### 5. *Operating Ratio*

Rasio untuk mengukur biaya operasi dari penjualan oleh perusahaan.

Pada penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas yakni *Return On Assets* dimana seberapa besar tingkat pengembalian investasi dari hasil penjualan yang dilakukan perusahaan.

### 2.5 *Corporate Governance*

World Bank mendefinisikan makna tata kelola perusahaan sebagai berikut “...suatu perpaduan antara hukum, peraturan perundang-undangan dan praktik yang dilakukan oleh sektor privat atas dasar sukarela yang memungkinkan perusahaan untuk menarik modal keuangan dan tenaga kerja, berkinerja secara efisien, dan dengan semua itu dapat secara berkesinambungan menghasilkan nilai-

*nilai ekonomi jangka panjang bagi para pemegang sahamnya, dan pada saat yang bersamaan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan dan masyarakat secara keseluruhan”*(Maassen, 2000).

Keputusan Menteri Koordinator bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri dimana pada tahun 1999 membentuk Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG). Prinsip-prinsip *Corporate Governance* dibuat oleh 30 perwakilan baik sektor publik maupun swasta. Pedoman umum pertamakali dikeluarkan tahun 2001 dengan KNKCG memiliki tugas pokok untuk merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional mengenai *Good Corporate Governance* serta memantau perbaikan dibidang *Corporate Governance* di Indonesia. Di dalam pedoman tersebut mengkedepankan asas pengungkapan dan transparansi.

Memasuki tahun 2004, penggantian nama menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) menjadi momen terpenting karena fokus utama ditujukan kepada tata kelola sektor publik. Pada April 2001, Komite Nasional Indonesia untuk Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Policies*) mengeluarkan *The Indonesian Code for Good Corporate Governance* (Kode Tata Kelola Perusahaan yang Baik) bagi masyarakat bisnis Indonesia (Effendi: 2009). Tata kelola perusahaan baik hanya ditujukan untuk perusahaan publik, badan usaha milik negara dan perusahaan yang mempergunakan dan mengelola dana publik.

Pemerintah mengeluarkan UU N0 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara. Dalam penjelasan pada bab umum butir IV disebutkan bahwa “Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaanya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik” (Johny S, 3).

Diawali dengan penerapan GCG pada perusahaan milik negara dimaksudkan untuk melihat apakah benar bahwa dengan tata kelola perusahaan yang baik akan meningkatkan nilai perusahaan. Dengan begitu diharapkan perusahaan swasta dapat melihat manfaat dan hasil yang didapatkan dan dapat menerapkan praktik GCG dalam perusahaannya. Menurut Bursa Efek Indonesia dalam penelitiannya *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) mengumumkan 30

perusahaan baik negara ataupun swasta yang mencapai skor *Corporate Governance* tertinggi pada tahun 2013. Pengukuran dianalisa dari hak pemegang saham, peran pemangku kepentingan, keterbukaan informasi, transparansi laporan keuangan dan tanggung jawab dewan direksi dan komisaris. Kelima faktor tersebut sama dengan kelima asas *Good Corporate Governance*.

Kerangka kerja tata kelola perusahaan di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip (1) Transparansi (2) Akuntabilitas (3) Responsibilitas (4) Independensi dan (5) Kewajaran dan Kesetaraan. Asas GCG diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha bank dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah serta pemangku kepentingan lainnya. (KNKG, 2006). Masing masing asas saling mempengaruhi satu sama lain demi terbentuknya suatu tata kelola yang baik. Apabila terdapat satu asas yang tidak diterapkan maka aspek bisnis didalam perusahaan tidak akan berkesinambungan.

Kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (*two-board system*) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi. Keduanya memiliki tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance : 2006, 12).

### **2.5.1 Ukuran Dewan Komisaris**

Di dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 1 menyebutkan bahwa Dewan Komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta member nasihat kepada Direksi. Dalam perusahaan bahwa harus terdapat minimal dua orang anggota Dewan Komisaris dimana salah satu anggotanya adalah Komisaris Independen.

Dewan Komisaris terdiri dari komisaris utama, komisaris independen dan komisaris dimana berkedudukan setara. Komisaris utama memiliki tugas mengkoordinasi kegiatan dewan komisaris. Tugas seorang dewan komisaris adalah mengawasi dan bertanggung jawab serta memberi nasihat kepada Direksi dan memastikan perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance* (Komite Nasional Kebijakan Governance: 2006, 13). Setiap anggota dewan komisaris harus wajib menaati aturan sebagai anggota dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Indriani (2013) dewan komisaris memiliki peran penting untuk mengawasi penerapan manajemen risiko untuk memastikan perusahaan sudah memiliki manajemen risiko yang baik. Ukuran dewan komisaris yang besar akan mengurangi teori keagenan dan menambah peluang bertukar informasi.

### **2.5.2 Proporsi Komisaris Independen**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota lainnya dan pemegang saham serta bebas dari hubungan bisnis atau lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam bertindak independen atau hanya untuk kepentingan perseroan dalam pengambilan keputusan.

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 20 No.3 mengenai keanggotaan dewan komisaris dimana jumlah komisaris independen diwajibkan paling kurang 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Anggota dewan komisaris terdiri dari dua orang dimana satu diantaranya adalah komisaris independen. Wijayanti (2013) jumlah anggota dewan komisaris dalam setiap perusahaan berbeda-beda disebabkan karena kompleksitas yang berbeda pula dengan tetap melihat keefektifan dalam mengambil keputusan.

### **2.5.3 Ukuran Komite Audit**

Peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK Nomor IX.I.5 tahun 2012 khusus mengenai Komite Audit mencantumkan bahwa seluruh emiten atau perusahaan publik diwajibkan memiliki Komite Audit. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris yang terdiri dari paling kurang tiga orang anggota. Ketiga anggota tersebut harus berasal dari Komisaris Independen dan pihak luar emiten. Komisaris Independen harus menjadi pimpinan dalam Komite Audit. Anggota komite audit lainnya yang merupakan pihak luar emiten harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh BAPEPAM-LK diantaranya adalah satu anggota memiliki latar belakang atau keahlian dalam bidang akuntansi atau keuangan dan bukan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum yang memberikan jasa *assurance* dan non kepada emiten bersangkutan dalam enam bulan terakhir.

Penelitian ini mengukur komite audit dari jumlah anggota didalamnya. Forker (1992) dalam Albitar (2014) komite audit termasuk mekanisme pengawasan yang

efektif untuk meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan dan mengurangi teori keagenan. Selain itu, Ho dan Wong (2001) dalam Albitar (2014) dengan adanya komite audit secara signifikan mempengaruhi luasnya pengungkapan.

## **2.6 Kerangka Pemikiran**

### **2.6.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Sukarela**

Penelitian Albitar (2014), Uyar (2011), Wijayanti (2013), Wardani (2012) dan Putri (2010) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan berhubungan positif terhadap pengungkapan sukarela perusahaan di dalam laporan tahunan. Perusahaan besar cenderung mengungkapkan informasi secara sukarela lebih besar dibanding perusahaan kecil. Hal tersebut karena perusahaan besar disorot oleh publik maupun pasar dan untuk mengurangi biaya keagenan (Putri : 2010). Dari ketiga variabel pengukuran untuk ukuran perusahaan bahwa total aktiva atau total aset dinilai tepat. Jatningsih (2004) dalam Putri (2010) total aktiva dinilai lebih stabil daripada nilai penjualan bersih dan kapitalisasi pasar.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini ialah :

**H<sub>1</sub>**: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela

### **2.6.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Sukarela**

Putri (2010) menggunakan rasio profitabilitas yakni *Return On Asset* sebagai indikator pengukuran hubungan terhadap pengungkapan sukarela. Semakin tinggi ROA maka akan semakin tinggi pengungkapan. Simanjuntak dan Widiastuti (2004) dalam Putri (2010) bahwa apabila ROA tinggi akan mendorong manajer untuk memberikan informasi lebih rinci karena mereka menginginkan investor yakin akan profitabilitas perusahaan dan kompensasi manajemen. Albitar (2014) dan Wardani (2012) meneliti bahwa profitabilitas berhubungan positif terhadap pengungkapan sukarela. Ukuran yang digunakanpun sama yakni *Return On Asset*.

Tetapi, Rouf (2011) mengemukakan bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi manajemen untuk mengungkapkan informasi secara sukarela. Profitabilitas yang tinggi sudah menjadi sumber informasi bagi para investor maka perusahaan tidak perlu untuk mengungkapkan kembali mengenai profitabilitas dalam laporan tahunan untuk dapat menarik investor. Informasi laba sudah menjadi informasi yang informatif bagi investor (Wijayanti : 2013). Hasil yang sama juga dilakukan oleh Uyar (2011).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini ialah:

**H<sub>2</sub>**: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap besarnya pengungkapan sukarela

### **2.6.3 Pengaruh Leverage terhadap Pengungkapan Sukarela**

Simanjuntak, et. All (2004) dalam Putri (2010) meneliti bahwa rasio *leverage* mempengaruhi pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Rasio yang digunakan adalah rasio hutang atau *debt ratio*. Rasio tersebut akan menjadi ukuran struktur modal yang dimiliki perusahaan terhadap modal yang ditanamkan oleh investor. Marwata (2001) dalam Putri (2010) perusahaan yang memiliki *debt ratio* tinggi maka wajib untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang sehingga perusahaan akan menyediakan informasi lebih banyak dan komprehensif.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini ialah :

**H<sub>3</sub>**: *Leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela

### **2.6.4 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Sukarela**

Barnhart dan Rosentein (1998) dalam Permansari (2012) komisaris independen memiliki fungsi menyalurkan kepentingan pemegang saham untuk melindungi hak mereka. Dengan adanya komisaris independen maka laporan keuangan yang dihasilkan akan berintegritas. Nasir dan Abdullah (2004) dalam Permansari (2012) semakin besar komposisi dewan independen maka akan meningkatkan pengungkapan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini ialah :

**H<sub>4</sub>**: Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela

### **2.6.5 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Sukarela**

Hasan (2013) dalam Wijayanti (2013) Semakin besar jumlah anggota dalam dewan komisaris maka semakin meningkatnya pengungkapan dalam laporan tahunan karena adanya pengawasan kepada manajemen dan mengurangi masalah keagenan. Penelitian Rouf (2011) menghasilkan bahwa ukuran dewan komisaris berhubungan positif terhadap pengungkapan sukarela.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini ialah :

**H<sub>5</sub>**: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela

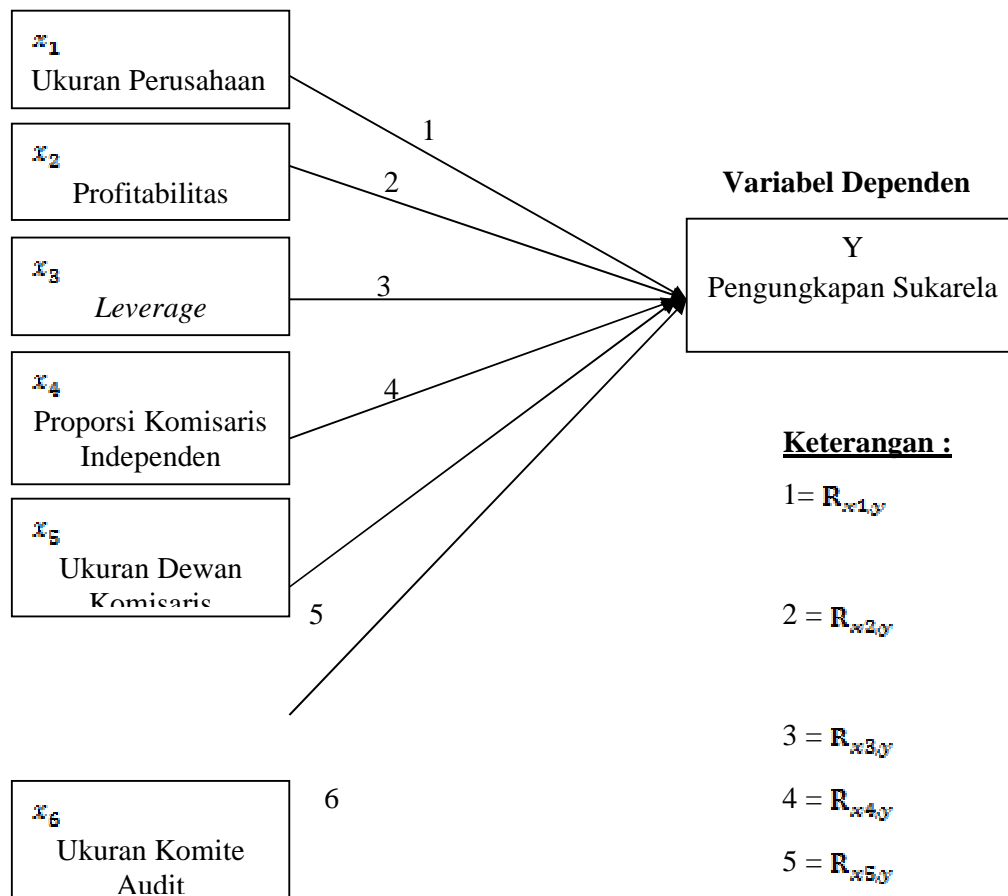
### 2.6.6 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Pengungkapan Sukarela

Rosario dan Flora (2005), Ho dan Wong (2001) dan McMullen (1996) dalam Rouf (2011) mengemukakan bahwa komite audit memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan dalam perusahaan. Dengan ukuran jumlah anggota yang duduk sebagai komite audit membantu untuk meningkatkan kualitas informasi antara pemegang saham dan manajer. Keberadaan komite audit adalah mekanisme untuk meningkatkan fungsi audit dalam pelaporan keuangan eksternal (Rouf : 2011).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini ialah :

**H<sub>6</sub>**: Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela

#### Variabel Independen



Gambar 2.1 : Model Penelitian

Sumber : Peneliti

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Albitar (2014) mengenai karakteristik perusahaan, atribut tata kelola dan pengungkapan sukarela perusahaan yang terdaftar di *Amman Stock Exchange* (ASE), Yordania. Variabel Independen yakni karakteristik perusahaan dispesifikasi melalui ukuran perusahaan, *leverage*, usia perusahaan, profitabilitas, dan likuiditas. Sedangkan variabel tata kelola dispesifikasi dengan direktur independen, ukuran komite audit, ukuran dewan dan struktur kepemilikan. Terdapat variabel moderating yaitu jenis industri, KAP dan status daftar. Metode penelitian adalah menggunakan *voluntary index* kepada 124 perusahaan yang terdaftar di ASE periode 2010-2012 dengan *univariate* dan *multivariate analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, *leverage*, usia perusahaan, profitabilitas, likuiditas, ukuran dewan dan ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela sedangkan direktur independen dan struktur kepemilikan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

Akhtaruddin,et.all (2010) meneliti hubungan antara *board ownership* dan komite audit terhadap pengungkapan sukarela. Dengan mengambil sampel 124 perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia menghasilkan bahwa *board ownership* tidak mempengaruhi pengungkapan sukarela perusahaan. Perusahaan dengan tingkat *board ownership* yang tinggi mengindikasikan jumlah dewan komisaris independen lebih dalam komite audit yang akan meningkatkan pengungkapan informasi dan mengurangi ketidakseimbangan informasi antara manajemen dan investor.

Mohammad,et.all (2010) meneliti hubungan antara unsur *Corporate Governance* dengan keberadaan pengungkapan terhadap perusahaan di Malaysia. Unsur tersebut yakni jumlah dewan komisaris. Hasil menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah keluarga yang menduduki jabatan sebagai dewan komisaris di perusahaan maka semakin rendah tingkat pengungkapan dalam laporan tahunan.

Mujiyono,et.all (2010) menguji pengaruh *leverage*, kepemilikan saham publik, *size* dan komite audit terhadap luas pengungkapan sukarela terhadap 74



sampel perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2002 tidak termasuk sektor perbankan. Metode penelitian menggunakan analisis *multiple regression*. Hasil penelitian bahwa *leverage* dan kepemilikan saham publik memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan sukarela serta *size* dan proporsi komite audit independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan yang *listing* di BEJ tahun 2002.

Putri (2010) melihat adanya pengaruh informasi keuangan dan non keuangan terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan sukarela pada laporan tahunan perusahaan *property* yang terdaftar di BEI tahun 2005-2007. Informasi keuangan yakni likuiditas tidak mempengaruhi terhadap tingkat pengungkapan sukarela sedangkan *leverage*, profitabilitas berpengaruh signifikan. Selain itu, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh dengan tingkat signifikansi yang rendah.

Permanasari (2012) menguji pengaruh karakteristik perusahaan dan mekanisme *corporate governance* terhadap pengungkapan informasi. Karakteristik perusahaan terdiri dari ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* serta unsur *corporate governance* terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, persentase komisaris independen dan jumlah komite audit. Metode penelitian menggunakan analisis regresi berganda kepada 100 sampel perusahaan properti, perdagangan, jasa dan investasi pada tahun 2007-2009. Hasil penelitian menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi sedangkan profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, persentase komisaris independen dan jumlah komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan properti, perdagangan, jasa dan investasi pada tahun 2007-2009.

Rouf (2011) bertujuan untuk meneliti pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, direktur independen (non-eksekutif), komite audit dan struktur kepemimpinan dewan terhadap pengungkapan sukarela perusahaan non keuangan yang terdaftar di *Dhaka Stock Exchange* (DSE), Bangladesh pada tahun 2007. Metode penelitian menggunakan *voluntary index* dengan analisis regresi menghasilkan bahwa ukuran dewan, struktur kepemimpinan dewan dan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Dan struktur kepemilikan dan profitabilitas tidak mempengaruhi pengungkapan sukarela.

Utama (2012) meneliti mengenai pengungkapan informasi perusahaan manufaktur di Indonesia pada tahun 2006. Tingkat pengungkapan informasi di ukur dengan item informasi Botosan (1997) sebanyak 35 item informasi sukarela. Dengan variabel independen yakni praktik *Corporate Governance* dan tingkat kompetisi yang di ukur dengan Indeks Herfindahl (HI) serta struktur kepemilikan dan total aset perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Corporate Governance*, tingkat kompetisi dan ukuran perusahaan (total aset) memiliki hubungan positif terhadap level pengungkapan perusahaan di Indonesia. Sedangkan, struktur kepemilikan dalam penelitian ini memfokuskan kepada kepemilikan *blockholder* yang terdiri dari tiga grup yaitu rendah, medium dan tinggi. Perusahaan dengan tingkat kepemilikan *blockholder* medium memiliki pengungkapan lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kepemilikan *blockholder* rendah.

Uyar (2011) meneliti jenis auditor, struktur kepemilikan, profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh dengan grafik atas pengungkapan sukarela yang dilaporkan dalam laporan tahunan. Metode penelitian terhadap 100 saham yang terdaftar pada *Istanbul Stock Exchange* (ISE), Turki pada tahun 2006. Dengan analisa *multivariate* menghasilkan bahwa ukuran perusahaan dan jenis auditor berpengaruh positif terhadap level pengungkapan sukarela dalam grafik. Sedangkan, profitabilitas dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh.

Wijayanti (2013) melihat bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Selain variabel independen tersebut, terdapat *leverage*, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Sampel penelitian hanya dilakukan terhadap perusahaan manufaktur *go public* yang terdaftar di BEI periode 2009 sampai 2011. .

Yunita (2013) melihat adanya pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Voluntary Disclosure* dan Biaya Hutang. Pengungkapan sukarela menjadi variabel moderat. Unsur *Corporate Governance* dilihat dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen dan kualitas audit. Dengan mengambil sampel 26 perusahaan manufaktur dalam BEI tahun 2008-2010. Hasil menunjukkan bahwa keseluruhan unsur *Corporate Governance* yang diuji tidak mempengaruhi pengungkapan sukarela.

## **2.8 Pengembangan Hipotesis**

Berdasarkan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran sebelumnya, penelitian ini membangun hipotesis dalam menguji hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut pembangunan hipotesis :

**H<sub>1</sub>**: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela

**H<sub>2</sub>**: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela

**H<sub>3</sub>**: *Leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela

**H<sub>4</sub>**: Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela

**H<sub>5</sub>**: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela

**H<sub>6</sub>**: Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela

